



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 345-354

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran BAPELITBANG dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Sikkap

Yani Nani Sugo^{1✉}, Antonius Philipus Kurniawan², Vinsensius Ama Muda³

Universitas Nusa Nipa, Maumere

Email: sugoyani97@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak Restoran di Kabupaten Sikka. Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi pada Bapelitbang khususnya di bidang Perekonomian Dan Sumberdaya Manusia (PSDA) yang memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah meliputi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran . Hasil Penulisan ini menunjukkan bahwa bapelitbang turut berperan dalam meningkatkan penerimaan penerimaan,efisiensi, dan kualitas pelayanan. Bayak tugas yang harus dilaksanakan oleh bidang PSDA serta jumlah sedikitnya personel pada bidang tesrsebut menajdi kendala tersendiri bagi bidang PSDA dalam menjalankan perannya dalam monitoring dan mengkoordinasi terkait penrimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Kata Kunci: *Peran, Pajak Hotel, Pajak Restoran ,Bapelitbang*

Abstract

This research aims to determine the role the Planning, Research and Development Agency (*Bapelitbang*) in increasing hotel tax and restaurant tax revenues in Sikka regency. The data collection methods used in this research were observation, interview and documentation at *Bapelitbang*, especially in the field of economics and human resources (*PSDA*), which has the obligation to monitor and evaluate regional income tax including hotel tax and restaurant tax revenues. The result of this research shows that *Bapelitbang* plays a role in increasing revenue, efficiency and service quality. There are many tasks that must be carried out by the *PSDA* sector in carrying out its role in monitoring and coordinating hotel tax and restaurant tax revenues.

Keywords: *Role, Hotel Tax, Restaurant Tax, Bapelitbang*

PENDAHULUAN

Pada era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, banyak sekali perubahan yang terjadi baik perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin cepat di era ini. Era yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Era Revolusi 4.0 ini menuntut pemerintah, industri, dan juga perusahaan untuk mengerahkan segala persiapan dalam menyikapinya. Hal ini tidak terkecuali juga dalam dunia pendidikan.

Dunia pendidikan juga dituntut untuk berinovasi dengan membuat suatu sistem pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dimulai dari tingkatan pendidikan yang paling rendah hingga pada tingkat perguruan tinggi. Berbicara mengenai inovasi dalam dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga telah menciptakan suatu terobosan sistem pembelajaran baru yang kemudian dikenal dengan nama program Merdeka Belajar.

Bagi perguruan tinggi, program merdeka belajar ini didesain dengan harapan agar dapat mencetak lulusan universitas yang tangguh dalam menghadapi perubahan. Terdapat banyak kegiatan daripada program Merdeka Belajar ini, salah satunya adalah dengan kegiatan Magang/Praktek Kerja bersertifikat pada industri maupun tempat kerja lainnya. Kegiatan magang ini didesain agar mahasiswa dapat belajar mengenai situasi dunia kerja secara langsung, sehingga nantinya akan melahirkan lulusan atau wisudawan yang sudah paham dan juga berpengalaman dalam dunia kerja.

Beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia telah banyak yang menyelenggarakan kegiatan Magang Bersertifikat bagi mahasiswanya, salah satu Perguruan tinggi yang juga menjalankan kegiatan Magang ini adalah Universitas Nusa Nipa Indonesia. Universitas Nusa

Nipa Indonesia adalah salah satu kampus swasta yang berada di daerah Kabupaten Sikka yang didirikan sejak tahun 2005.

Pada tanggal 16 Agustus 2023, Universitas Nusa Nipa mengutus sebanyak 11 Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen untuk melakukan kegiatan Magang/Praktek Kerja pada Kantor Bapelitbang Kabupaten Sikka yang mana dalam kesempatan ini penulis Juga merupakan salah satu Mahasiswa yang berkesempatan mengikuti kegiatan ini.

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan adalah salah satu perangkat daerah pada lingkup pemerintah Kabupaten Sikka mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam proses melakukan kegiatan magang ini, penulis ditempatkan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA). Bidang PSDA sendiri adalah salah satu bidang yang terdapat pada kantor Bapelitbang Kabupaten Sikka yang mana bidang ini mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi meliputi urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral. Dalam kegiatannya, bidang PSDA juga melaksanakan fungsinya yang salah satunya adalah fungsi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ekonomi. Dalam menjalankan fungsinya ini, bidang PSDA melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (MONEV PAD) pada sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah pengampu PAD yang berada di daerah Kabupaten Sikka.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh suatu daerah dari hasil pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah itu sendiri. Menurut UUD No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 poin ke 18 menyatakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa sumber penerimaan PAD salah satunya berasal dari hasil pemungutan pajak daerah (Weo et al, 2022).

Pajak Daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel menurut PERDA Sikka Nomor 10 tahun 2017 dalam Pasal 1 poin ke 9 pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pelayanan yang disediakan oleh hotel berupa jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan pajak restoran menurut PERDA Sikka Nomor 10 tahun 2017 dalam Pasal 1 poin ke 11 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Berikut tabel data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Sikka dari tahun 2018 – 2022 :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2022

Jenis Pajak	TAHUN									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Hotel	1.900.000.000	1.422.490.204	1.400.000.000	1.261.025.600	254.787.500	338.064.079	292.088.000	573.462.387	1.092.088.000	907.374.048
Hotel Bintang Satu (2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	1.900.000.000	1.422.490.204	1.400.000.000	1.261.025.600	254.787.500	338.064.079				
Pajak Restoran	1.900.000.000	1.538.000.493	1.310.207.500	2.096.262.099,80	1.556.034.000	2.024.849.089,50				
Restoran	1.187.503.485	1.009.774.212	800.000.000	841.229.047	54.548.500	123.652.335	62.534.000	280.281.541,00	672.350.558	275.590.494
Rumah Makan	617.494.201	456.425.581	430.000.000	1.181.010.552,80	1.501.485.500	1.846.284.554,50	1.721.03.000	1.369.670.715,50	2.583.488.700	2.085.625.109
Warung	0,00	1.183.200	207.500	882.500	0,00	0,00	62.759.000,00	62.135.000,00	82.795.000	101.182.45

Pedagang	95.002.31	70.617.50	80.000.00	73.140.0	54.775.50	54.912.20		
Kaki Lima	4	0	0	00,00	0	0	0,00	0,00

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat baik target maupun realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara totalnya mengalami fluktuatif. Pajak Hotel Kabupaten Sikka mengalami kenaikan realisasi penerimaan yang cukup besar pada tahun 2022 dan penurunan cukup besar pada tahun 2020. Sedangkan Pajak Restoran Kabupaten Sikka mengalami kenaikan realisasi penerimaan yang cukup besar pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Jalan Mawar Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Kegiatan magang kerja dijalankan selama kurang lebih empat bulan terhitung dari tanggal 16 Agustus 2023 sampai tanggal 23 Desember 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kegiatan. Data yang dikumpulkan dengan metode wawancara bersama Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama melaksanakan proses magang pada kantor Bapelitbang Sikka, banyak kegiatan yang telah dilaksanakan. Beberapa diantaranya adalah kegiatan Verifikasi dan Validasi data peserta penerima bantuan iuran (Verval P3KE). Kegiatan Verval P3KE ini dilaksanakan dengan mendata langsung di tiap-tiap desa dan kelurahan terkait keadaan peserta P3KE untuk mengetahui apakah peserta yang namanya telah terdaftar tersebut masih layak menjadi penerima bantuan iuran atau tidak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan apakah bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak serta mampu memangkas anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain kegiatan diatas, ada kegiatan lain juga yang dilakukan oleh bidang PSDA berupa, Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai (Monev DAS), melakukan sosialisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), selain itu bidang PSDA juga melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Monev UMKM), serta melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (Monev PAD).

Selama melakukan monitoring penerimaan Pajak Hotrl dan Pajak Restoran, diketahui penerimaan Kabupaten Sikka dari tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:

Data Target Penerimaan Pajak Hotel 2018 – 2021

Tabel 5.1 Target Penerimaan Pajak Hotel

No	Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)
1	2018	1.900.000.000
2	2019	1.400.000.000
3	2020	254.787.500
4	2021	292.088.000
5	2022	1.092.088.000

Data Realisasi Target Penerimaan Pajak Hotel 2018 – 2022

Tabel 5.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

No	Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
1	2018	1.422.490.204
2	2019	1.261.025.600
3	2020	338.064.079
4	2021	573.462.387
5	2022	907.374.048

Data Penerimaan Target Pajak Restoran 2018 – 2022

Tabel 5.3 Target Penerimaan Pajak Restoran

No	Tahun	Realisasi (Rp)
1	2018	1.900.000.000
2	2019	1.310.207.500
3	2020	1.556.034.00
4	2021	
5	2022	

Data Realisasi Penerimaan Pajak Restoran 2018– 2022

Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

No	Tahun	Realisasi (Rp)
1	2018	1.538.000.493.
2	2019	2.096.262.099,80
3	2020	2.024.849.089,50

4	2021	-
5	2022	-

Pembahasan

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) turut mengambil peran dalam penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) di kabupaten Sikka. Peran Bapelitbang ini sesuai dengan fungsi Bapelitbang itu sendiri, Yaitu fungsi perencanaan, penelitian dan juga fungsi pengembangan daerah. Perlu diketahui bersama bahwa tinggi atau rendahnya penerimaan Pendaptan Asli Daerah (PAD) pada suatu kabupaten dipengaruhi dari seluruh sumber PAD yang mana salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Daerah. Dalam kaitanya dengan penerimaan Pajak Daerah dan sesuai dengan fungsi Bapelitbang seperti yang telah dijelaskan diatas maka diketahui bahwa peran Bapelitbang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah adalah Sebagai berikut :

1. Perencanaan

Bapelitbang bertanggung jawab untuk merancang dan menyusun rencana pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak Hotel dan Restoran. Dalam hal ini, Bapelitbang memiliki tugas untuk menyusun rencana pajak daerah yang memprhitungkan faktor-faktor potensi penerimaan efisiensi dan kualitas pelayanan. Rencana ini menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten dan Retribusi Daerah, hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Sikka No.48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitan dan Pengembangan. Terkait dengan penerimaan Pajak Daerah, Bidang yang berperan melakukan koordinasi serta menjalankan tugas dan fungsi Bapelitbang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah adalah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA). Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh bidang PSDA serta jumlah sedikitnya jumlah personel pada bidang tersebut menjadi kendala tersendiri bagi bidang PSDA dalam menjalankan perannya dalam monitoring dan mengkoordinasi terkait penerimaan Pajak Daerah.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan (Bapelitbang) telah merumuskan beberapa program kerja untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sikka. Berikut beberapa program tersebut :

- a. Peningkatan Kapistas Petugas Pajak
 - 1) Pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) kepada petugas pajak terbaru, teknik pemeriksaan pajak, dan strategi penagihan pajak yang efektif.
 - 2) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan informal, seperti seminar, workshop dan pelatihan.
- b. Peningkatan Pajak Daerah Dan Pengawasan Wajib Pajak
 - 1) Pendataan ulang wajib pajak hotel dan restoran untuk memastikan semua wajib pajak terdaftar dan terdata dengan benar
 - 2) Intensifikasi pengawasan terhadap wajib pajak, termasuk pemeriksaan rutin dan inspeksi mendadak.
 - 3) Penerapan sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi untuk memudahkan proses pendataan, pengawasan dan penagihan pajak
- c. Peningkatan Kesadarandan Kepatuhan Wajib Pajak
 - 1) Sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan sanksi bagi yang tidak patuh
 - 2) Pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak.
 - 3) Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, seperti penyederhanaan proses pembayaran pajak dan pemberian informasi yang mudah diakses.
- d. Peningkatan Kerjasama Antar Instansi
 - 1) Kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menidak wajib pajak yang tidak patuh.
 - 2) Kerja sama dengan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatfi untuk meningkatkan potensi pajak hotel dan restoran.
 - 3) Kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memudahkan proses pembayaran pajak.
- e. Inovasi Dan Digitalisasi Layanan Pajak
 - 1) Pengembangan aplikasi mobile untuk pembayaran pajak online.
 - 2) Penerapan system e-faktur untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan pajak.
 - 3) Pemanfaatan teknologi big data untuk analisis dan profiling wajib pajak.
- f. Penibngkatan Potensi Pajak
 - 1) Pengembangan kawasan wisata baru untuk menarik wisatawan dan meningkatkan potensi pajak hotel.

- 2) Pembinaan pengembangan usaha kecil menengah (UKM) untuk meningkatkan potensi pajak restoran.
- 3) Penyelenggaraan event-event besar untuk menarik wisatawan dan meningkatkan potensi pajak hotel dan restoran.

Diharapkan dengan program-program kerja tersebut, penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sikka dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa bapelitbang turut berperan dalam meningkatkan penerimaan, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh bidang PSDA serta jumlah sedikitnya personel pada bidang tersebut menjadi kendala tersendiri bagi bidang PSDA dalam menjalankan perannya dalam monitoring dan mengkoordinasi terkait penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Dwi, Dimas. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: UB Press.
- Anwar, M. Jusuf. (2012). *Hukum Pajak: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Kencana Prestasi Cendikia.
- Mahmudi. (2020). *Analisis Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Semarang.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan*. 15 Desember 2016. Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 48. Maumere.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011. *Pajak Daerah*. 24 Desember 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 10. Maumere.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman pengelolaan keuangan daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.

- Purwomartani. (2014). *Pajak dan retribusi daerah edisi revisi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Samosir, Magdalena Sirawati. (2020). Analisis pengaruh kontribusi dan efektifitas pajak hotel restoran, dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal Of Publicadministration Governmen* 1:37
- Sitompul, Maradona & Lubis, Atmey. (2013). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 1(1):1-10
- Soemitro Djojohadikusumo, Rochmat. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. (2004). *Hukum pajak Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. (2004). *Hukum pajak suatu pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soeparmono. (2004). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sutrisno. 2001. *Konsep pendapatan asli daerah*. Jakarta : Rajawali.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007. *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Vianey,Y .M., Dekrita, Y. A., & Aek (2023). Analisis keuangan pada BLUD RSUD dr. TC Hillers Maumere : Skripsi tidak diterbitkan. Maumere : Program studi manajemen .Universitas Nusa Nipa
- Weo, R., Kurniawan, AP, & Muda, VA (2022). Peran Bapelitbang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah *Jurnal Projem UNIPA*, 9(1), 01-06.